

## STOP KEKERASAN DAN PEMBUNUHAN DI PAPUA



**Catatan dan Refleksi Peristiwa Hak Asasi Manusia di Tanah Papua Juli – Desember 2018**  
**Oleh Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua**  
**(SKPKC FP)**  
**Januari 2019**



## I. Pengantar

Papua di Tahun 2018 semakin 'memanas'. Pada awal tahun 2018, Papua ditenarkan dengan peristiwa KLB Kesehatan di Kabupaten Asmat dan kasus kesehatan di beberapa tempat lainnya. Di akhir tahun 2018, Papua menjadi bahan cerita, diskusi dan perdebatan dengan beberapa peristiwa yang menyedihkan. Sebut saja kuatnya pembungkaman ruang demokrasi, kasus penembakan di Alguru dan Yigi, Kabupaten Nduga serta rencana Negara untuk mendirikan berbagai markas militer.

Segala peristiwa ini menjadi bagian yang tidak akan dilupakan oleh masyarakat di Tanah Papua. Tidak dilupakan karena warga sipil tetap menjadi korban dan 'disakiti'. Perjuangan untuk mendapatkan keadilan, kebebasan dan pelurusan sejarah, mendapat tekanan dari Negara Indonesia. Di tengah persoalan panas tersebut, Negara Indonesia berhasil dalam negosiasi mendapatkan saham dari Perusahaan PT Freeport.

Manusia Papua dan alam kekayaannya menjadi 'tumbal'. Warga yang memperjuangkan keadilan harus berhadapan dengan tekanan, teror, intimidasi, kekerasan fisik bahkan sampai pada pembunuhan. Warga harus dipaksa untuk 'lari' dari tanah ulayatnya.

**Kekerasan dan Pembunuhan** masih terus terjadi di Tanah Papua karena perbedaan ideologi, karena kebenaran dan keadilan. **Kekerasan dan Pembunuhan** masih terus terjadi di Tanah Papua karena kerakusan akan kekayaan dan kuasa masih terus merajalela.

Beberapa peristiwa yang disebutkan di atas, coba dinarasikan ulang dan direfleksi oleh Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua (SKPKC FP). Peristiwa ini dilihat sebagai sebuah serial 'memoria passionis' dari manusia dan alam Papua. Papua menjadi **Surga yang Terlantar** yang penuh senyuman. Surga itu terpaksa tersenyum dalam situasi yang tidak jelas dan tidak benar.

## **II. Beberapa Peristiwa Tenar di Tanah Papua**

### **A. Penembakan di Wilayah Alguru dan Yigi, Tanah Ndugama, Kabupaten Nduga, Papua**

#### **1. Peristiwa di Wilayah Alguru, Tanah Ndugama, Kabupaten Nduga**

##### **Kejadian Awal**

Duka masih tetap ada di Tanah Ndugama, Nduga, Papua. Pada tahun 2016-2017, warga di Wilayah Mbua, Nduga berjuang untuk luput dari serangan penyakit. Mereka berusaha bertahan hidup dengan segala kekurangan fasilitas kesehatan. Orang tua harus merelakan sekian banyak anaknya meninggal dunia. Pada bulan Agustus – Oktober 2017, tim solidaritas wilayah Yigi menemukan sebanyak 35 anak meninggal karena penyakit yang mereka derita<sup>1</sup>. Duka akan kematian yang bergeser satu tahun ini, dibuka lagi dengan kejadian besar di wilayah yang sama pada tahun 2018.

Berdasarkan beberapa informasi yang beredar, konflik bersenjata bermula dari penembakan Pesawat Dimonim pada 22 Juni 2018 di Bandara Kenyam, Nduga. Akibat penembakan ini, serpihan peluru mengenai co-pilot Irena Nur Fadila di pergelangan kaki kanan. Pesawat ini membawa 17 anggota anggota BKO Brimob untuk mengamankan Pilgub. Pelakunya diduga dilakukan oleh TPN OPM. Penembakan dilakukan lagi pada 25 Juni 2018 terhadap pesawat Twin Otter Trigana Air. Pesawat ini membawa 15 anggota BKO Brimob dengan tujuan yang sama. Akibat penembakan tersebut, Pilot Abdulah Kamil menerima serpihan peluru di bagian bahu sebelah kanan dan kepala bagian belakang. Penembakan berlanjut lagi pada 6 Juli 2018. Penembakan ini disasarkan kepada Brimob yang melakukan pengamanan di Bandara Kenyam. Penembakan ini menyebabkan seorang anggota Brimob terkena tembakan. Aksi penembakan ini mengundang dan membakar semangat pihak militer untuk berperang dan melakukan penyisiran di sekitar wilayah tersebut sampai ke Kampung Alguru yang disebut sebagai markas TPN OPM.

---

<sup>1</sup>Peristiwa ini dapat dilihat dalam video konferensi pers oleh mahasiswa Nduga di Kota Jayapura di <https://www.youtube.com/watch?v=fjuutUVWny0&t=12s>

## **Pengejaran Pelaku Penembakan**

Seperti biasanya yang sudah terjadi bahwa pasca penembakan pastilah penyisiran dilakukan untuk mengejar pelaku. Bala bantuan mulai dikirim ke Wilayah Alguru, Nduga untuk mengejar pelaku penembakan. Di dalam siaran pers yang dirilis oleh Solidaritas HAM untuk Nduga mencatat sekitar 1000-an personel gabungan TNI Polri dikirim untuk melakukan pengejaran kepada para pelaku penembakan<sup>2</sup>. Dari pihak kepolisian Papua mengatakan bahwa operasi ini merupakan operasi penegakan hukum<sup>3</sup>. Bupati Nduga, Yairus Gwijangge menjelaskan bahwa operasi yang dilakukan oleh pihak militer tidak berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Nduga. Menurut Yairus, ada penembakan yang dilakukan dari udara melalui helikopter<sup>4</sup>. Pernyataan Bupati ditanggapi oleh pihak kepolisian. Menurut Kapolres Jayawijaya yang membawahi Polres Nduga, AKBP Yan Pieter Reba, Helikopter yang digunakan adalah untuk mengangkat logistik Pilkada, obat-obatan dan bahan makanan. Sedangkan Kapolri Jendral Pol. Tito Karnavian menjelaskan bahwa pengiriman pasukan tambahan ke Nduga untuk melakukan pengamanan pelaksanaan Pilkada.

*"Kita tidak akan mundur, kita akan tetap kirim pasukan. Saya sudah sampaikan ke Pak Kapolda, kalau kurang, kita akan tambah lagi"<sup>5</sup>.*

Dari pihak TPN OPM melalui Komandan Operasi Lapangan Kodap III Ndugama, Egianus Kogeya bertanggung jawab akan peristiwa penembakan tersebut.

*"Semua rangkaian kasus penembakan pesawat tanggal 22 Juni, 25 Juni dan 27 Juni adalah murni perjuangan kami TPN PB Kodap III Ndugama. Maka kami siap bertanggung jawab. Dan perjuangan kami akan berakhir sampai titik darah penghabisan"<sup>6</sup>*

---

<sup>2</sup>Siaran persnya dapat diakses di <http://fransiskanpapua.org/wp-content/uploads/2018/07/SIARAN-PERS-SOHAM-NDUGA.pdf>

<sup>3</sup>Bdk. <https://tabloidjubi.com/artikel-17626-kapolda--di-nduga-tidak-ada-operasi-militer-namun-operasi-penegakan-hukum.html>, diakses pada Senin, 16 Juli 2018

<sup>4</sup>Bdk. [https://kbr.id/nasional/07-](https://kbr.id/nasional/07-2018/baku_tembak_di_nduga_200an_warga_kampung_alguru_mengungsi/96566.html)

2018/baku\_tembak\_di\_nduga\_200an\_warga\_kampung\_alguru\_mengungsi/96566.html, diakses pada Senin, 16 Juli 2018 atau <https://tabloidjubi.com/artikel-17688-klasis-kingmi-keneyam-tiga-orang-meninggal-paska-penyisiran-aparat-keamanan.html>, diakses pada Senin, 16 Juli 2018

<sup>5</sup>Bdk. <https://tabloidjubi.com/artikel-17625-bupati-nduga--saya-minta-warga-tidak-lari-semunyi-ke-hutan.html>, diakses pada Senin, 16 Juli 2018

<sup>6</sup>Bdk. <http://suarapapua.com/2018/07/09/tpn-pb-kodap-iii-ndugama-mengaku-bertanggungjawab-atas-penembakan-di-kenyam/>, diakses pada Selasa, 10 Juli 2018

Peristiwa pengejaran pelaku menjadi kabur karena akses bagi jurnalis independen tidak ada. Berdasarkan informasi yang diperoleh SoHAM Nduga, tidak ada ruang dan kesempatan bagi jurnalis atau pihak yang mencari data lapangan. Semua akses mendapat pengawalan dan pemeriksaan ketat oleh pihak keamanan. Bahkan pada SoHAM melakukan audiens dengan pihak MRP, salah satu anggota MRP menjelaskan bahwa MRP juga tidak diberikan ruang tersebut.

*“Kami memang hendak ke Alguru, tetapi di Wamena kami ditahan. Kami sempat berkomunikasi dengan Bupati Nduga agar bisa memberikan kami akses tetapi tidak bisa”<sup>7</sup>*

Publik yang tidak mengetahui secara benar kejadian dan operasi pengejaran pelaku penembakan, hanya mencernah informasi-informasi yang beredar. Akhirnya publik pun menafsirkan berdasarkan informasi yang diperolehnya. Ada pihak yang mendukung operasi yang dilakukan pihak militer tetapi ada yang menolak keras karena mengorbankan warga sipil yang tak bersalah. Salah satu media online yang cukup mengikuti pemberitaan kasus Alguru, Nduga, tirta.id memberikan judul beritanya pada edisi 13 Juli 2018 “**Periksa Fakta: Kabar Kabur tentang Kejadian di Nduga, Papua**”. Pada edisi ini tirta.id mengulas sumber foto hutan yang terbakar. Berdasarkan hasil investigasi tirta.id, sumber foto hutan yang terbakar itu tidak benar. Bukan hutan di Papua dan di Kalimantan. Walaupun demikian, faktanya adalah ada kontak senjata di Alguru, Nduga dan operasi pengejaran pelaku penembakan yang dilakukan oleh pihak militer.

### **Pasca Penyisiran**

Menurut Juru Bicara Lembaga Masyarakat Adat Nduga, John Beon, ratusan warga Kampung Alguru belum pulang ke rumahnya pasca operasi penyisiran yang dilakukan oleh pihak militer. Tempat tinggal warga hancur dirusak oleh aparat gabungan TNI-Polri<sup>8</sup>. Sekitar 200-an warga sipil harus mengungsi ke hutan, Wamena, Yahukimo dan Asmat. Pasca operasi penegakan hukum ini ditemukan ada

---

<sup>7</sup>Ungkapan yang disampaikan oleh

<sup>8</sup>*Ibid.*,

tiga warga sipil yang meninggal<sup>9</sup>. Akibat lainnya adalah matinya aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik kepada warga.

Peristiwa konflik bersenjata di Wilayah Alguru dan nasib warga sipil mengundang banyak pihak memberikan reaksi dan tanggapan. Pihak-pihak yang disebutkan di sini adalah pihak-pihak yang mengutamakan keselamatan warga sipil. Di Tanah Papua, para pegiat HAM (NGO, Advokat, Mahasiswa, Lembaga Gereja) membentuk solidaritas hak asasi manusia untuk Nduga yang disingkat dengan SoHAM Nduga. Solidaritas ini melakukan audiens ke pihak DPR Papua, MRP untuk memberikan tekanan kepada pihak militer agar tidak berlebihan melakukan penyisiran di Wilayah Alguru, Nduga. Di dalam siaran persnya yang dikeluarkan pada 13 Juli 2018<sup>10</sup>, SoHAM Nduga menyatakan beberapa sikapnya, seperti:

1. Mendesak Aparat Polisi dan TNI menghentikan operasi ke Kampung Alguru, Kabupaten Nduga;
2. Mendesak Pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten Nduga, TNI dan Polri untuk menjamin keamanan dan keselamatan warga Nduga tanpa terkecuali;
3. Mendesak dibuka akses dan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi Pekerja HAM, jurnalis dan medis;
4. Mendesak Komnas HAM untuk segera melakukan investigasi dan langkah-langkah selanjutnya terkait peristiwa penyerangan tersebut.
5. Mendesak Pemerintah Pusat dan Provinsi Papua bertindak proaktif dalam penyelesaian konflik Nduga;
6. Mendesak segera dibentuknya Tim Pencari Fakta Gabungan (TPFG) untuk mengumpulkan bukti dan fakta, proses dan dampak dari operasi gabungan tanggal 11 Juli 2018
7. Kapolda Papua harus menjelaskan secara konperhensif dan transparan operasi penegakan hukum di Nduga kepada publik.

---

<sup>9</sup>Bdk. <https://tabloidjubi.com/artikel-17688-klasis-kingmi-keneyam-tiga-orang-meninggal-paska-penyisiran-aparat-keamanan.html>, diakses pada Senin, 16 Juli 2018

<sup>10</sup>Siaran persnya dapat diakses di <http://fransiskanpapua.org/wp-content/uploads/2018/07/SIARAN-PERS-SOHAM-NDUGA.pdf>

Selain SoHAM, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia (FRI) untuk West Papua yang berada di Yogyakarta menggelar aksi demo damai<sup>11</sup>. Di dalam aksi ini masa demo menyampaikan beberapa tuntutan<sup>11</sup> yakni:

1. Tarik militer organik maupun non organik dari Nduga dan seluruh Tanah Papua
2. Buka akses jurnalis lokal maupun asing untuk melakukan peliputan di Tanah Papua
3. Menuntut Komnas HAM agar segera menyelesaikan kasus represif militer di Nduga
4. Hak menentukan nasib sendiri adalah solusi terbaik bagi masyarakat di Tanah Papua.

## **2. Peristiwa di Yigi, Tanah Ndugama, Kabupaten Nduga, Papua Kejadian Awal**

Setelah kejadian di Wilayah Alguru, Tanah Ndugama, Nduga, kembali menjadi sorotan. Seperti biasanya hampir seluruh masyarakat asli Papua merayakan hari kemerdekaannya pada 1 Desember. Perayaan ini juga dirayakan di Tanah Ndugama, Nduga. Berdasarkan penuturan Ketua Sinode Gereja Kemah Injili Papua, Pendeta Beny Giyai, kejadian ini berawal dari aksi protes warga terhadap anggota TNI yang memotret ibadah warga pada 1 Desember. Laporan yang diterima oleh Pdt. Beny dari jemaatnya bahwa ibadah tersebut dihadiri oleh masyarakat, pemerintah, dan satu orang yang diduga anggota TNI. Masyarakat merasa tidak aman karena ada yang memotret perayaan tersebut. Masyarakat meminta agar foto itu dihapus tetapi 'orang' yang diduga anggota TNI tersebut meninggal tempat ibadah dan menuju ke pos TNI. Karena usaha masyarakat tidak berhasil, maka pada Minggu, 2 Desember 2018, masyarakat kembali meminta orang tersebut menghapus foto-fotonya. Pada saat itulah terjadi aksi tembak menembak yang mengakibatkan ada yang meninggal karena tembakan<sup>12</sup>. Korban penembakan adalah para pekerja jalan dari PT Isaka Karya di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Nduga. Menurut pengakuan Wakil Ketua DPRD Nduga Alimin Gwijangge, ada 24 pekerja dikabarkan

---

<sup>11</sup>Aksi demo damai dapat diakses di link youtube <https://www.youtube.com/watch?v=JiErX-7gprs>

<sup>12</sup>Bdk. <https://tabloidjubi.com/artikel-21679-gereja--insiden-nduga-berawal-dari-aksi-protes-warga.html>, diakses pada Senin, 7 Desember 2018

tewas dan dua orang melarikan diri<sup>13</sup>. Pelaku penembakan adalah TPN OPM yang dipimpin oleh Egianus Kogoya. Hal ini diperkuat lagi dengan pernyataan yang disampaikan oleh Juru Bicara OPM Sebby Sambom. Menurut Sebby, pihak OPM-lah yang menembaki para pekerja PT Isaka Karya.

Informasi lainnya terkait awal kejadian penembakan adalah pada Sabtu, 1 Desember 2018, dua mobil menuju Camp Distrik Yigi, masing-masing membawa 15 pekerja dari PT Isaka Karya. Pada Minggu, 2 Desember 2018, satu mobil kembali ke Wamena. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa satu mobil yang membawa 15 pekerja belum kembali ke Wamena, maka pada Senin, 3 Desember 2018, personil gabungan Polri dan TNI yang dipimpin oleh Kabag Ops Polres Jayawijaya AKP R.L Tahapary bergerak dari Wamena ke Yigi. Namun sampai di kilo meter 46, tim ini bertemu dengan 1 mobil dari arah Distrik Mbua dan menyampaikan bahwa jalan diblokir oleh kelompok bersenjata. Berdasarkan informasi tersebut, pihak Polda Papua mengirinkan pasukan melalui jalur darat dari Wamena ke Yigi. Pasukan berjumlah sekitar 150 pasukan gabungan TNI Polri<sup>14</sup>. Sedangkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bahwa ada 154 tentara dan polisi yang dikirim ke Papua untuk mengusut kejadian di Nduga<sup>15</sup>.

Terkait dengan korban penembakan, di beberapa media menyebutkan berbedabeda. Ada yang mengatakan 24 orang (informasi dari Wakil DPRD Nduga), 19 orang (15 diantaranya meninggal dunia, informasi dari Polda Papua), 17 orang (informasi dari Kodam Cenderawasih), 31 orang (Media Jakarta)<sup>16</sup>.

Ini adalah nama-nama yang korban yang dirilis oleh Kodam XVII Cenderawasih<sup>17</sup>:

No	Nama Korban	Status	Asal
1	Mathinus Sampe (25)	Selamat	Toraja
2	Ayub	Selamat	Toraja

<sup>13</sup>Bdk. <http://suarapapua.com/2018/12/04/24-pekerja-jembatan-diberitakan-tewas-dibunuh-di-nduga/>, diakses pada Kamis, 6 Desember 2018

<sup>14</sup>*Ibid.*,

<sup>15</sup>Bdk. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46510807>, diakses pada Rabu, 12 Desember 2018

<sup>16</sup>Bdk. <https://tirto.id/simpang-siur-puluhan-pekerja-tewas-di-nduga-papua-daVo>, diakses pada Rabu, 5 Desember 2018 & <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46510807>, diakses pada Rabu, 12 Desember 2018

<sup>17</sup>Bdk. <https://regional.kompas.com/read/2018/12/06/14095591/ini-28-nama-korban-perkerja-istaka-karya-yang-bekerja-di-nduga>, diakses pada Jumat, 7 Desember 2018



3	Jeprianto (25)	Selamat	Toraja
4	Jimmy Aritonang	Selamat	Sumatera Utara
5	Jonny Arung (45)	Selamat	Sulawesi Selatan
6	Mathius Palinggih (53)	Selamat	Toraja
7	Tarkih	Selamat	Papua
8	Efrendi Hutagaol (27)	Proses pencarian	Sumetara Utara
9	Rikki Cardo Simanjuntak	Proses pencarian	Sumetara Utara
10	Anugerah (17)	Proses pencarian	Toraja
11	Alipanus/Nano (27)	Proses pencarian	Toraja
12	Agustinus T (35)	Proses pencarian	Toraja
13	Dino Kondo	Proses pencarian	Toraja
14	Carly Zatrino/Calung (25)	Proses pencarian	Toraja
15	Daniel Karre/Dani	Proses pencarian	Toraja
16	Markus Allo	Proses pencarian	Toraja
17	Aris Usi	Proses pencarian	Toraja
18	Yusran	Proses pencarian	Toraja
19	Yousafat	Proses pencarian	Toraja
20	Petrus Ramli	Proses pencarian	Toraja
21	Simon Tandi	Proses pencarian	Kalimantan Timur
22	Samuel Pakiding	Proses pencarian	Kalimantan Timur
23	Muh. Agus (25)	Proses pencarian	Gowa
24	Fais Syahputra	Proses pencarian	Makasar
25	M. Ali Akbar	Proses pencarian	Makasar
26	Hardi Ali	Proses pencarian	Makasar
27	Emanuel Beli Naiekteas Bano	Proses pencarian	NTT
28	Jepri Simare-Mare	Proses pencarian	Tebing Tinggi

Menurut Wakapendam XVII Cenderawasih Lektkol Inf. Dax Sianturi terdapat 16 orang dipastikan meninggal dunia. Informasi lainnya adalah data yang dihimpun per-Rabu, 5 Desember 2018, ada 15 orang selamat dengan rincian, 7 karyawan PT Isaka Karya, 6 pekerja bangunan Puskesmas Mbua dan 2 orang pekerja Gedung SMP Mbua<sup>18</sup>.

<sup>18</sup>Informasi ini disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Letkol Inf. Dax Sianturi, bdk. <https://tirta.id/dua-warga-sipil-ditemukan-selamat-dari-penembakan-di-nduga-papua-da9b>, diakses pada Jumat, 7 Desember 2018

## **Pengejaran Para Pelaku Penembakan**

Seperti pada kejadian di Wilayah Alguru, bala bantuan untuk pengejaran terhadap kelompok pimpinan Egianus Kogoya digerakan oleh militer. Bala bantuan pertama dilakukan pada Senin, 3 Desember 2018 dengan mengirimkan pasukan berjumlah 150 personel gabungan TNI Polri. Dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan akan menurunkan pasukan nonorganik untuk membantu penanganan kasus Nduga<sup>19</sup>. Terkait dengan jumlah pasukan tidak disebutkan.

Operasi pengejaran pelaku penembakan terus digerakan oleh pihak militer hampir sepanjang bulan Desember 2018. Baik itu melalui pantuan udara dan darat. Semuanya dijalankan oleh pihak militer. Operasi pengejaran pelaku penembakan ini serta merta pasti mengorbankan warga sipil. Di beberapa kejadian di Tanah Papua, operasi penyisiran, pengejaran pelaku atau operasi penegakan hukum, rakyat yang tidak bersalah menjadi korban. Beberapa media menyebutkan bahwa ada korban jiwa warga sipil dan rumah warga dirusak/dibakar. Pengejaran pelaku penembakan menumbuhkan kembali rasa trauma rakyat Ndugama. Karena takut, rakyat harus dan terpaksa mengungsi, bersembunyi dan menderita.

Hal menarik lainnya terkait operasi penegakan hukum ini adalah beredarnya informasi pihak militer menggunakan bom atau serangan dari udara. Pihak militer sepertinya menunjukkan kekuatannya terhadap rakyat Papua. Di media [www.bbc.com](http://www.bbc.com), menyebutkan bahwa ada warga Nduga yang melihat militer menembak dari udara dan menggunakan bom.

*"Tentara menembak ayah saya. Saya kaget, setelah itu saya melompat. Lalu saya juga ditembak tapi meleset. Hanya kena baju saya ini sampai sobek"*<sup>20</sup>

Selain anak sekolah, ada warga lainnya yang sempat diwawancari oleh tim bbc menjelaskan bahwa dia melihat sendiri ada bom yang dilepaskan oleh aparat

---

<sup>19</sup>Bdk. <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/11/17430451/pasukan-nonorganik-ikut-diterjukkan-dalam-operasi-di-nduga-papua>, diakses pada Rabu, 13 Desember 2018

<sup>20</sup>Ungkapan seorang anak berusia 14 tahun yang selamat dari penembakan, bdk. [https://www.bbc.com/indonesia/media-46605315?ocid=wsindonesia.chat-apps.in-app-msg.whatsapp.trial.link1\\_.auin](https://www.bbc.com/indonesia/media-46605315?ocid=wsindonesia.chat-apps.in-app-msg.whatsapp.trial.link1_.auin), diakses pada Jumat, 21 Desember 2018

keamanan. Informasi penembakan dari udara dan pengeboman ini ditanggapi oleh pihak militer dari pusat sampai ke daerah.

*"Tidak ada yang namanya bom. Tetapi kalau pelibatan TNI, iya. Karena mereka memang sudah merupakan kekuatan yang tidak setuju dengan negara"*<sup>21</sup>

Sejalan dengan pernyataan Menkopolkam Wiranto, perwakilan Kodam Cenderawasih XVII Kol. Inf. Muhamad Aidi membantah segala tuduhan penembakan dari udara dan pengeboman di wilayah Yigi, Ndugama, Nduga.

### **Pasca Operasi Pengejaran Pelaku Penembakan Situasi di Yigi, Ndugama, Kabupaten Nduga**

Operasi pengejaran pelaku penembakan, di Wilayah Yigi, Nduga, tentunya berdampak pada segala aktivitas atau rutinitas masyarakat di Tanah Ndugama. Beberapa informasi yang diwartakan oleh beberapa media terkait pasca operasi pengejaran pelaku pun beranekaragam. Di media tabloidjubi.com meneruskan informasi dari salah satu tokoh pemuda Papua Samuel Tabuni bahwa 2 orang di Mbua dan 2 orang di Yigi.

*"Dua di Mbua, dua di Yigi, Semuanya keluarga dekat saya. Mereka ditembak aparat keamanan saat aparat lakukan proses evakuasi. Satu di Mbua itu paman saya. Dia majelis gereja, namanya Yulianus Tabuni"*<sup>22</sup>

Masih di media tabloidjubi.com yang meneruskan informasi dari Ketua Sinode Gereja KINGMI Papua Pdt. Beny Giyai bahwa ratusan jumlah warga Mbua, Yall dan Yigi telah mengungsi ke hutan sejak operasi pengejaran TPN PB. Menurut Pdt. Beny ada 5 kllasis jemaat yang telah mengungsi ke hutan sejak evakuasi korban

---

<sup>21</sup>Ungkapan yang disampaikan oleh Menkopolkam Wiranto di Jakarta, bdk. [https://www.bbc.com/indonesia/media-46605315?ocid=wsindonesia.chat-apps.in-app-msg.whatsapp.trial.link1\\_.auin](https://www.bbc.com/indonesia/media-46605315?ocid=wsindonesia.chat-apps.in-app-msg.whatsapp.trial.link1_.auin), diakses pada Jumat, 21 Desember 2018

<sup>22</sup>Informasi yang disampaikan oleh Samuel Tabuni, bdk. <https://tabloidjubi.com/artikel-21744-sejak-evakuasi-dilakukan-empat-warga-nduga-dilaporkan-tewas-lainnya-mengungsi-ke-hutan-.html>, diakses pada Selasa, 11 Desember 2018

penembakan dilakukan<sup>23</sup>. Pendeta Beny menyampaikan hal itu karena warga yang ada di tiga wilayah ini adalah mayoritas jemaat dari Gereja KINGMI Papua.

*“Masing-masing jemaat itu rata-rata diisi oleh 30-50 kepala keluarga. Jadi jumlah yang diketahui mengungsi dari empat klasis itu ada sekitar 780 kepala keluarga. Jika 1 keluarga dua orang saja, sudah lebih dari 1500 orang yang mengungsi”<sup>24</sup>*

Informasi yang dikeluarkan dari media [www.bbc.com](http://www.bbc.com), melanjutkan informasi dari Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge menjelaskan bahwa timnya menemukan dua jenazah di Distrik Mbua, 1 jenazah di Distrik Dal dan 1 jenazah di Mbulmu Yama. Menurut Wentius, jenazah yang ditemukan ini adalah warga sipil yang melarikan diri ke hutan. Selain itu ada tiga jenazah yang ditemukan membusuk dan hancur. Jenazah ini langsung dikuburkan<sup>25</sup>.



Bapak Ninsuon Gwijangge bersama istrinya, pengungsi dari Yigi, Nduga, yang berhasil ke Wamena

### **Dukungan Untuk Perdamaian di Yigi, Tanah Ndugama, Kabupaten Nduga**

Peristiwa duka yang menimpa masyarakat di Tanah Ndugama mengundang banyak pihak untuk bersimpati. Dukungan ini dilakukan, baik dari dalam Papua (lokal), nasional maupun internasional. Dukungan ini dilakukan oleh kelompok solidaritas dan mereka yang menghendaknya adanya perdamaian dengan idealisme yang beranekaragam.

Dalam keterangan resminya melalui situs [ulmwp.org](http://ulmwp.org), Ketua ULMWP Beny Wenda, meminta Pemerintah Indonesia segera menghentikan aktivitas di Tanah Ndugama, Papua. Menurut Beny, satu-satunya cara menghentikan tumpah darah itu adalah adanya pengakuan internasional agar orang Papua diizinkan secara bebas dan tanpa tekanan memilih kedaulatan politiknya. Perjuangan yang mereka lakukan

<sup>23</sup>Bdk. <https://tabloidjubi.com/artikel-21770-gereja--ratusan--keluarga-di-nduga-mengungsi-ke-hutan.html>, diakses pada Kamis, 11 Desember 2018

<sup>24</sup>*Ibid.*,

<sup>25</sup>Bdk. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46625432>, diakses Jumat, 21 Desember 2018

adalah bukanlah kriminal tetapi membela diri dari ancaman luar<sup>26</sup>. Selain itu mendesak PBB untuk mengirim tim pencari kebenaran terhadap kejahatan HAM di Papua.

Dari pihak Pemerintah Provinsi Papua, Gubernur Lukas Enembe akan membentuk tim investigasi dalam peristiwa di Yigi, Nduga tersebut. Menurut Lukas, Pemerintah Indonesia segera mencari solusi yang tepat untuk menjawab tuntutan kemerdekaan.

*"Pada dasarnya mereka (kelompok bersenjata) itu minta merdeka, tidak butuh pembangunan itu sudah dari dulu"<sup>27</sup>*

Di tingkat kabupaten, pihak Pemkab Nduga bersama MRP, Gereja, LSM, mahasiswa, Polisi dan TNI membentuk tim untuk membantu melakukan evakuasi rakyat. Salah satu anggota DPR Papua Laurensius Kadepa menilai bahwa operasi militer yang dilakukan di Nduga terlalu berlebihan. Hal senada juga disampaikan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang menilai bahwa pendekatan kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan persoalan di Papua, justru akan menciptakan luka-luka baru yang pada gilirannya akan menciptakan lingkaran kekerasan<sup>28</sup>.

Aksi solidaritas duka yang mendalam bagi rakyat di Tanah Ndugama terus bermunculan. Pada Rabu, 5 Desember 2018, di Taman Imbi, Kota Jayapura, Perwakilan Komnas HAM Papua dan puluhan warga menggelar aksi bakar lilin untuk korban yang meninggal dalam kasus penembakan di Yigi, Tanah Ndugama, Nduga<sup>29</sup>. Di Sleman, Yogyakarta, mahasiswa juga mengadakan aksi pemasangan lilin pada 10 Desember 2018. Aksi ini ditunjukkan untuk korban penembakan.

---

<sup>26</sup>Bdk. [https://tirto.id/pemerintah-diminta-hentikan-aktivitas-militer-di-papua-barat-dbcC?utm\\_source=Tirtoid&utm\\_medium=](https://tirto.id/pemerintah-diminta-hentikan-aktivitas-militer-di-papua-barat-dbcC?utm_source=Tirtoid&utm_medium=), diakses pada Jumat 21 Desember 2018

<sup>27</sup>Ungkapan yang disampaikan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, bdk. <https://tabloidjubi.com/artikel-22008-gubernur-dprp-mrp-dan-gereja-akan-bentuk-tim-investigasi-tragedi-nduga.html>, diakses pada Selasa 18 Desember 2018

<sup>28</sup>Bdk. <https://tabloidjubi.com/artikel-21770-gereja--ratusan--keluarga-di-nduga-mengungsi-ke-hutan.html>, diakses pada Kamis, 11 Desember 2018

<sup>29</sup>Video aksi ini bisa diakses di [https://www.youtube.com/watch?v=Ys\\_SEid8xzs](https://www.youtube.com/watch?v=Ys_SEid8xzs), <https://www.youtube.com/watch?v=ZllldtvZlpE> & <https://www.youtube.com/watch?v=tc94cMOJRyU>

Aksi lainnya adalah pada Sabtu, 22 Desember 2018, Pkl.19.33 Waktu Papua, beberapa anak muda melakukan aksi spontan terkait persoalan di Tanah Ndugama. Sebuah spanduk yang bertulis “Save Nduga, Papua Kehilangan Damai Natal” sepertinya mengganggu pihak Kepolisian Sektor Aberapura. Aksi damai ini terpaksa dibubarkan oleh pihak Kepolisian Sektor Abepura. Aksi lilin juga dilakukan di Jakarta. Sebanyak 50 orang dalam solidaritas #Save Nduga melakukan aksi pasang lilin dan doa di Taman Aspirasi, Istana Negara, Jakarta, Rabu, 26 Desember 2018<sup>30</sup>.

Kedua aksi pertama dan kedua aksi yang kedua sama-sama menghendaknya ada perdamaian di Tanah Papua, khususnya di Tanah Ndugama, Nduga. Sama-sama menghendaki agar tidak ada korban nyawa lagi. Walaupun demikian, kedua aksi berikutnya (Lingkaran Abepura dan Taman Aspirasi) cukup berbeda adalah selain mengenang korban penembakan, massa juga bersolidaritas terhadap rakyat Nduga yang ada di hutan Ndugama. Rakyat Ndugama yang lari, ketakutan, trauma karena operasi pengejaran pelaku penembakan yang dilakukan oleh pihak militer.

*“Kami ingin menghayati dan merasakan seperti rakyat sipil yang berada di hutan sana, mereka bertahan hidup tapi takut dibunuh di tanahnya sendiri. Mereka menahan lapar, bahkan banyak yang tidak dapat ditemui keluarganya sendiri karena mereka semua mendapat tekanan oleh aparat keamanan”<sup>31</sup>*

Solidaritas untuk mengumpulkan bantuan berupa material untuk para pengungsi terus dilakukan hingga Januari 2019. Bagi tim yang tergabung dalam solidaritas untuk Nduga, segala material yang terkumpul belum bisa didistribusikan ke Tanah Ndugama, Nduga. Tim hanya bisa membagikan kepada masyarakat Nduga yang lolos ke Wamena. Akses transportasi darat ke Yigi masih belum bisa ditembusi oleh tim solidaritas.

---

<sup>30</sup>Bdk. <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/solidaritas-savenduga-ibadah-kasih-di-depan-istana-negara>, diakses pada Jumat, 28 Desember 2018

<sup>31</sup>Ungkapan yang disampaikan oleh Darson Lokbere, salah satu massa yang bersolidaritas di Taman Aspirasi, Jakarta. Bdk. <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/solidaritas-savenduga-ibadah-kasih-di-depan-istana-negara>, diakses pada Jumat, 28 Desember 2018 atau <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181226204650-32-356595/solidaritas-papua-jokowi-beri-kado-natal-kekerasan-nduga>, diakses pada Jumat, 28 Desember 2018

### **Tanah Ndugama, Nduga: Beberapa Kali Jadi Target Operasi**

Operasi penegakan hukum yang dikumandangkan oleh pihak militer dalam pengejaran pelaku penembakan di Tanah Ndugama, Nduga, Papua bukan merupakan operasi yang pertama kali dilaksanakan. Pertama kali operasi militer dilakukan pada tahun 1977-1978 di Jayawijaya, 2). Penyerangan oleh militer pada tahun 1981 di Wouma, Wamena, 3). Operasi pembebasan penyanderaan tim peneliti Lorens pada tahun 1996, 4). Operasi militer pasca kejadian pembobolan senjata di Gudang Senjata milik Kodim 1702 Jayawijaya pada tahun 2003 dan 5). Pada Juli tahun 2018 di Alguru, 6). Pada Desember tahun 2018 di Yigi. Kita bisa membayangkan bagaimana pengalaman trauma akan ketakutan dari masyarakat sipil Papua, khususnya di Tanah Ndugama, Nduga. Berapa jumlah korban nyawa manusia yang sudah hilang, berapa anak asli Nduga yang kehilangan orang tua dan keluarganya dan masih banyak lagi litani kesedihan di Tanah Ndugama, Nduga.

### **Akses yang Tertutup Bagi Jurnalis dan Tim Independen ke Tanah Ndugama, Nduga, Papua**

Kabut informasi tentang kedua peristiwa yang terjadi di Tanah Ndugama, Nduga, Papua menjadi salah satu bahan diskusi yang cukup mendalam. Masing-masing media dengan segala kepentingannya atau diboncengi oleh kelompok tertentu menyebarkan informasi semaunya. Hal ini pasti berdampak pada pemahaman dan cara pandangan yang kabur di publik. Penjelasan tentang kabutnya informasi ini dapat kita lihat dalam ulasan [tirto.id](https://tirto.id).

Pada kejadian Juli 2018, publik dikagetkan dengan beredarnya foto hutan terbakar dan sebuah helikopter. Dari hasil penelitian media [tirto](https://tirto.id) foto tersebut bukan merupakan sebuah foto istimewa. Foto tersebut juga bukan menjelaskan hutan Papua, Nduga yang terbakar. Ada juga yang menyebutkan keterangan foto tersebut adalah kebakaran hutan di Gunung Lawu, bukan pula di hutan Kalimantan<sup>32</sup>. Faktanya adalah di Alguru ada penembakan dan pengiriman pasukan untuk mengejar TPN PB.

Pada kejadian kedua di Tanah Ndugama, yakni di Yigi, informasi awal tentang korban penembakanpun berbeda-beda. Ada yang menyebutkan 31 orang, 24 orang, 19 orang dan 17 orang. Siapa yang dapat mengklarifikasi dengan baik informasi jumlah korban

---

<sup>32</sup>Bdk. <https://tirto.id/kabar-kabur-tentang-kejadian-di-nduga-papua-cN7c>, diakses pada Senin 16 Juli 2018

ini. Otoritas masing-masing mengeluarkan pernyataan yang berbeda-beda terkait situasi di lapangan. Kita bisa lihat di awal kejadian Alguru, Bupati Nduga Yairus Gwijangge mengatakan bahwa ada penembakan dari udara.

*"Kami ada di Nduga. Tapi belum pernah diinformasikan bahwa akan ada penembakan dari atas. Mereka diam-diam menjalani. Tiga kali lakukan penembakan. Penembakannya boom boom boom, tiga kali, dengan posisi beda"<sup>33</sup>*

Setelah pernyataan bupati ini, beredar pula sebuah video dari bupati sendiri yang mengatakan bahwa di Nduga, Kota Kenyam, Alguru, situasinya aman dan terkendali.

Di sini kita tidak mempersoalkan apakah foto hutan yang terbakar pada peristiwa Alguru dan jumlah korban tetapi kita mempersoalkan kebenaran informasi dan fakta serta ruang yang cukup bagi jurnalis dan tim independen untuk melakukan investigasi dan mengeluarkan hasil temuannya. Niat baik untuk menelusuri fakta yang terjadi di Tanah Ndugama, Nduga, ternyata belum sepenuhnya didukung secara penuh oleh Negara Indonesia, dalam hal ini pihak militer. Bahkan hingga saat ini akses melalui jalan darat untuk membantu para pengungsi masih cukup sulit. Tim solidaritas untuk Nduga selalu berhati-hati karena harus melewati pemeriksaan yang ketat dari pihak militer. Ingatan akan pernyataan Presiden RI Joko Widodo bahwa membuka ruang bagi jurnalis asing ke Papua masih menjadi sebuah pertanyaan yang belum bisa diselesaikan di Tanah Papua.

---

33Bdk. [https://kbr.id/nasional/07-2018/baku\\_tembak\\_di\\_nduga\\_\\_200an\\_warga\\_kampung\\_alguru\\_mengungsi/96566.html](https://kbr.id/nasional/07-2018/baku_tembak_di_nduga__200an_warga_kampung_alguru_mengungsi/96566.html), diakses pada Senin, 16 Juli 2018



## B. Ruang Demokrasi yang Terus Dibungkam

Pada pertengahan dan akhir tahun 2018 (Juli, September-Desember), suara untuk keadilan bagi manusia dan tanah Papua terus disuarakan oleh generasi muda Papua dan mereka yang bersolidaritas untuk derita dan luka-luka di Tanah Papua. Suara-suara ini pun mendapat tekanan dan dibungkam oleh mereka yang tidak menghendaki kebebasan bagi manusia Papua. Selain aksi turun jalan menyampaikan pendapat di muka umum, diskusi tentang Papua pun (pelanggaran HAM dan Refrendum) tidak diperbolehkan dan dibubarkan.

Pada 6 Juli 2018, mahasiswa yang berada di Kota Surabaya menggelar acara diskusi terkait kasus Pelanggaran HAM Berat Biak 6 Juli 1998 di asramanya. Namun kegiatan diskusi ini dibubarkan oleh aparat kepolisian dan Ormas di Kota Surabaya. Aksi pembubaran kegiatan diskusi ini mendapat sorotan dari kelompok yang pro demokrasi. Sebanyak 57 organisasi yang pro demokrasi mengutuk tindakan yang berlebihan dari dari Alat Negara dan Ormas Surabaya<sup>34</sup>. Walaupun demikian, pihak kepolisian membantah bahwa mereka tidak terlibat dalam pembubaran diskusi tersebut, yang membubarkan diskusi adalah kelompok masyarakat.

*"Kalau (pembubaran) dari kami tidak ada. Penolakan murni dari warga (kota Malang)"*<sup>35</sup>

Sedangkan di Kota Jakarta, mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia (FRI) untuk West Papua menggelar aksi turun jalan di Taman Pandang Istana, Monas, Jakarta Pusat, 1 Juli 2018, tentang hari aneksasi Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain menuntut pelurusan sejarah, masa aksi juga meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk menutup dan menghentikan aktivitas eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan-perusahaan asing, menarik militer organik dan non organik dari Tanah

---

<sup>34</sup>Bdk. <http://suarapapua.com/2018/07/17/diskusi-amp-surabaya-dibubarkan-paksa-pada-6-juli-57-organisasi-ini-bersolidaritas/>, diakses pada Senin, 18 Juli 2018

<sup>35</sup>Ungkapan yang disampaikan oleh Kapolres Malang Kota, AKBP Asfuri, Senin (02/07), seperti dilaporkan wartawan di Malang, Eko Widiyanto, untuk BBC News Indonesia, bdk. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44682734>, diakses pada Selasa, 4 Juli 2018

Papua serta memberikan jaminan kebebasan pers dan akses terhadap informasi di Papua<sup>36</sup>.

Pada 4 September 2018, masa aksi United Liberation National for West Papua (ULNWP) yang berada di Tanah Tabi Jayapura melakukan aksi dukungan terhadap negara-negara PIF yang membawa isu Papua ke Sidang Umum PBB. Berdasarkan informasi yang diperoleh sebanyak 79 orang ditahan dalam aksi menyampaikan pendapat di muka umum tersebut<sup>37</sup>. Aksi menyampaikan pendapat di muka umum dilakukan lagi pada 24 September 2018. Generasi muda Papua yang dimotori oleh perkumpulan mahasiswa di Kota Jayapura menggelar aksi demo damai untuk mendukung agenda Negara Pasifik yang membawa isu Papua ke Sidang Umum PBB ke-73. Aksi untuk menyampaikan pendapat ini harus berhadapan dengan Alat Negara Indonesia. Pihak kepolisian melakukan penghadangan, penangkapan dan pemukulan terhadap masa aksi. Mahasiswa Universitas Sains Teknologi Jayapura (USTJ) terpaksa dihadang di halaman kampusnya ketika melakukan demo. Menurut Sekretaris Aksi Kris Dogopia, polisi membubarkan masa aksi tetapi masa tidak mau. Pihak kepolisian menahan masa aksi ke mobil Dalmas. Pada kesempatan itu terjadi pemukulan terhadap salah satu masa aksi oleh pihak kepolisian.

*“Satu mahasiswa, Petrus Kosamah dipukul di halaman kampusnya. Polisi bubarkan tetapi mahasiswa tidak mau. Polisi paksa tarik (pendemo), naikkan ke truk Pengendali Massa (Dalmas). Saat itulah terjadi pemukulan”<sup>38</sup>*

Cerita lainnya terkait dengan aksi ini, sebelum aksi pada 24 September 2018, salah satu anggota Solidaritas Nasional Mahasiswa Papua (SoNaMaPa) PR di Kota Jayapura mendapat teror dan intimidasi dari pihak kepolisian di Kota Jayapura. Intimidasi itu berupa rumah anggota SoNaMaPa tersebut didatangi oleh pihak kepolisian dan

---

<sup>36</sup>Bdk. <https://tirto.id/aliansi-mahasiswa-tuntut-papua-bebas-dari-kolonialisme-indonesia-cNlm>, diakses pada Senin, 3 Juli 2018

<sup>37</sup>Bdk. <https://tabloidjubi.com/artikel-19165--demo-ulmwp-total-ada-79-pendemo-ditangkap-polisi.html>, diakses pada Rabu, 5 September 2018

<sup>38</sup>Pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Aksi ULNWP Kris Dogopia, bdk. <https://tabloidjubi.com/artikel-19741-demo-ulmwp-67-mahasiswa-ditangkap-satu-dipukul-polisi.html>, diakses pada Selasa, 25 September 2018

menyampaikan kepada keluarganya agar melarang PR dan teman-temannya untuk tidak melakukan aksi turun jalan pada 24 September 2018.

*“Ada dua anggota intelegen datang ke rumah saya. Salah satunya memperkenalkan diri sebagai Kanit Intelkam Polsek Dok 8 Jayapura Utara. Tujuan kedatangan mereka adalah perintah langsung dari Kapolresta Jayapura AKBP Urbinas. Mereka mengatakan bahwa kalau ada aksi besok, kami akan ditangkap. Kedatangan mereka ini membuat istri dan orang tua saya panik. Tidak ada prosedural seperti surat perintah yang mereka bawa”<sup>39</sup>*

Pada kesempatan massa aksi yang kumpul di beberapa tempat di Kota Jayapura ditangkap oleh pihak kepolisian. Massa aksi ditangkap di Terminal Expo Waena, Halaman Kaampus USTJ, Depan Kantor Pos Abepura. Berdasarkan data yang dimiliki oleh masa aksi, sekitar 67 orang masa aksi yang ditangkap oleh pihak kepolisian.

Aksi menyampaikan pendapat ini semakin kuat dan menyebar dilakukan baik itu di Tanah Papua maupun di luar Papua. Aksi menyampaikan pendapat di muka umum untuk mendesak Negara Indonesia menyelesaikan persoalan HAM di Tanah Papua serta mendesak akan kemerdekaan bagi Tanah Papua.

Tanggal 1 Desember merupakan waktu bersejarah bagi manusia dan Tanah Papua. Tanggal tersebut diperingati sebagai hari kelahiran Bangsa Papua. Biasanya dilakukan dengan perayaan oleh masyarakat Papua, hampir di seluruh Tanah Papua. Pada 1 Desember 2018 ini, dilakukan dengan aksi menyampaikan pendapat di muka umum. Situasi menjelang tanggal 1 Desember selalu ‘panas’. Pada tahun 2018, aksi sweeping selalu dilakukan oleh pihak militer. Dari Laporan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melalui Jubir Ones Suhuniap, Sekretariat Pusat KNPB di Kota Jayapura, disweeping oleh aparat gabungan TNI Polri.

*“Aparat gabungan menggunakan 9 truck tentara/polisi, 3 mobil Polantas, 5 mobil strada milik polisi, 6 mobil avansa, motor dan dengan senjata lengkap. Mereka juga melakukan intimidasi kepada Ketua Umum KNPB Agus Kosay dan beberapa aktivis KNPB lainnya. Selain itu terdengar 3 kali bunyi tembakan ke udara. Penggerebakan ini telah dilakukan empat kali selama. Perkakas*

---

<sup>39</sup>Wawancara dengan korban PR pada Selasa, 25 September 2018 di Jayapura

dapur dan makan dihancurkan dan dihambur oleh mereka. Pada kesempatan ini, mereka menangkap salah satu mahasiswa atas nama Larius Heluka<sup>40</sup>

Cerita sweeping di Sekretariat Pusat KNPB juga terjadi dengan mahasiswa Papua yang sedang melanjutkan studinya di Kota Malang, Surabaya. Sekitar 50 anggota Ormas Pemuda Pancasila dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI) datang ke Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jumat, 30 November 2018<sup>41</sup>. Tujuan kedatangan mereka adalah mendesak mahasiswa Papua tidak turun jalan untuk melakukan aksi dengan membawa isu Papua Merdeka pada Sabtu, 1 Desember 2018. Pada kesempatan ini juga Ormas membawa spanduk yang bertuliskan **“Arek Suroboyo Menolak dan Siap Melibas Gerakan Separatis dan Tangkap Provokator yang Berusaha Pecah Belah NKRI”**.

Baik sweeping yang dilakukan di Sekretariat Pusat KNPB maupun Ormas di Kota Malang, Surabaya yang mendatangi Asrama Mahasiswa Papua di Kalasan, tidak menyurutkan semangat generasi muda Papua untuk tetap pada agendanya. Turun jalan untuk menyampaikan pendapatnya terkait pelurusan sejarah di Tanah Papua dan memberikan hak penentuan nasib sendiri tetap dilaksanakan. Mahasiswa Papua tidak sendirian. Mereka yang tergabung dalam Front Rakyat Indonesia (FRI) untuk West Papua membantu para generasi muda untuk menyuarakan hal yang sama. Di beberapa



Dok. LBH Papua  
Masa aksi 1 Desember 2018 yang 'diamankan' di  
Polsek Abepura

<sup>40</sup>Penjelasan yang disampaikan oleh Jubir KNPB Ones Suhuniap dalam laporannya.

<sup>41</sup>Bdk. <https://nasional.tempo.co/read/1151111/pp-dan-fkppi-bakal-hadang-demo-mahasiswa-yang-usung-papua-merdeka/full&view=ok>, diakses pada Senin, 3 Desember 2018

kota di Indonesia, aksi turun jalan untuk menyampaikan pendapatnya dilakukan. Seperti di Kota Kupang (NTT), Ambon, Ternate, Surabaya dan Manado.

Alhasil, suara pelurusan itu tetap disampaikan tetapi tetap ada penangkapan dari pihak kepolisian. Jelas, bahwa bagi Alat Negara (Negara Indonesia), suara itu adalah suara makar bukan suara pelurusan sejarah. Namun bagi generasi muda dan yang tahu baik tentang sejarah pencaplokan tanah Papua, suara itu merupakan suara yang kebenaran dan mengungkap manipulasi sejarah yang selama ini terjadi. Berdasarkan laporan KNPB Pusat melalui Juru Bicaranya Ones Suhuniap, sekitar 309 orang ditangkap dalam aksi memperingati 1 Desember 2018 tersebut. Di Kota Kupang (NTT) sebanyak 18 orang, Ambon sebanyak 43 orang, Ternate sebanyak 99 orang, Surabaya 16 orang, Manado (Sulawesi Utara) sebanyak 211 orang, Sentani (Kabupaten Jayapura) sebanyak 44 orang, Manokwari sebanyak 37 orang, Abepura dan Kota Jayapura sebanyak 16 orang, Fait Asmat 1 orang<sup>42</sup>. Sedangkan dari pantauan koalisi Pengacara HAM di Papua (LBH Papua, KPKC Sinode GKI di Tanah Papua dan PAHAM Papua) terdapat 85 orang Papua yang ditangkap dalam acara peringatan dan ibadah syukur 1 Desember 2018<sup>43</sup>. Sedangkan media [www.bbc.com](http://www.bbc.com) memberitakan bahwa sekitar hampir 600 orang ditangkap yang melakukan aksi pro kemerdekaan untuk Papua di berbagai kota yakni di Ternate, Ambon, Makasar, Kupang, Jayapura, dan Manado<sup>44</sup>. Semangat untuk meluruskan sejarah dan memperjuangkan kemerdekaan bagi manusia dan Tanah Papua didukung oleh pernyataan sikap dari organisasi perjuangan dan gerakan yakni *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP). Di dalam pernyataan sikapnya, "Kami Terus Memperjuangkan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat dan Bangsa Papua Sebagai Solusi Demokratis"<sup>45</sup>, ULMWP tetap menjadi sebuah payung untuk menyuarakan kemerdekaan di Tanah Papua.

---

<sup>42</sup>Laporan dari Juru Bicara KNPB Pusat Ones Suhuniap.

<sup>43</sup>Bdk. Laporan Koalisi Pengacara HAM Papua (LBH Papua, KPKC Sinode GKI di Tanah Papua dan PAHAM Papua), video siaran persnya dapat diakses di [https://www.youtube.com/watch?v=rpLySNZ\\_x1s](https://www.youtube.com/watch?v=rpLySNZ_x1s),

<sup>44</sup>Bdk. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46411149>, diakses pada Senin, 3 Desember 2018

<sup>45</sup>Pernyataan sikap ini dapat diakses di <http://fransiskanpapua.org/2018/12/03/pernyataan-sikap-ulmwp/>



Dok. KNPB  
Masa aksi Hari HAM yang ditahan di Waena, Kota Jayapura



Dok. KNPB  
Masa aksi Kota Sorong yang merayakan Hari HAM 10 Desember 2018

Aksi perlawanan damai yang ditunjukkan oleh generasi muda Papua masih terus berlanjut. Mereka terus menyuarakan pelurusan sejarah tanahnya dan segala pelanggaran HAM yang terjadi dengan mengikuti waktu-waktu yang telah dilalui. Peringatan 10 Desember yang diperingati sebagai Hari HAM Internasional digunakan oleh generasi muda Papua untuk menyuarakan segala pelanggaran HAM di Tanah Papua. Di Kota Jayapura, aksi turun jalan menyampaikan pendapat di muka umum terkait pelanggaran HAM dimotori oleh mahasiswa dan kelompok gerakan muda Papua.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Filsafat dan Theologi Fajar Timur Jayapura melakukan aksi turun jalan dalam bentuk aksi diam. Suara-suara mereka diwakili oleh poster dan spanduk/baliho yang mereka pajangkan. Mereka mendesak Negara Indonesia untuk menyelesaikan segala bentuk pelanggaran HAM di Tanah Papua. Selain mendesak Negara Indonesia, aksi diam yang disertakan fragment ini bertujuan memberitahukan kepada publik, khususnya di Kota Jayapura bahwa pelanggaran HAM itu masih tetap dan terus terjadi di Tanah Papua<sup>46</sup>.

Selain aksi diam berjubah dari BEM STFT Fajar Timur, aksi turun jalan peringatan hari HAM 10 Desember juga dilakukan oleh kelompok muda (KNPB) dan mahasiswa Papua lainnya. Di Kota Jayapura, aksi peringatan HAM ini dihadang dan dibubarkan oleh alat negara (TNI dan Polri). Aksi ini dilakukan di beberapa daerah di Tanah Papua seperti di

---

<sup>46</sup>Bdk. <http://fransiskanpapua.org/2018/12/11/diam-untuk-sadarkan-negara/>, diakses pada 11 Desember 2018. Video aksi diam ini dapat diakses di <https://www.youtube.com/watch?v=XwLcrOwsWLM>

Timika, Sorong Raya, Manokwari, Fakfak dan Merauke. Di Kota Timika, aksi memperingati HAM terpaksa dibubarkan oleh aparat gabungan TNI Polri. Masa aksi ditangkap oleh aparat keamanan. Berdasarkan laporan dari Juru Bicara KNPB Pusat, Ones Suhuniap, sebanyak 90 orang atau masa aksi yang merayakan hari HAM ditangkap. Rencana aksi dengan melakukan long march ke Kantor DPRD Mimika tidak berjalan karena dihadang oleh aparat gabungan<sup>47</sup>. Sedangkan di Kota Merauke masa aksi sebanyak 41 orang yang diantara usia anak-anak ditangkap oleh pihak kepolisian. Di Kota Jayapura, aksi yang rencananya ke Kantor DPR Papua tidak diizinkan oleh pihak kepolisian. Massa semuanya berkumpul di putara taksi Perumnas 3 Waena dan melakukan orasi HAM. Di Kota Sorong, Fakfak dan Manokwari, aksi memperingati hari HAM Internasional ini berjalan walaupun mendapatkan tekanan dari alat negara<sup>48</sup>. Ada beberapa pesan yang disampaikan dalam peringatan Hari HAM Internasional sebagai berikut:

1. Negara Indonesia bertanggung jawab menuntaskan kasus pelanggaran HAM seperti Kasus Wamena 2003, Wasior 2001, Paniai 2014 dan Byak 1998.
2. Stop militerisme di Tanah Papua: tarik semua militer organik dan non organik dari Tanah Papua
3. Segera kembalikan hak politik Bangsa Papua Barat
4. Stop kekerasan dan pembunuhan di Tanah Papua
5. Stop kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
6. Stop eksploitasi Sumber Daya Alam Papua dengan menutup semua perusahaan yang beroperasi di Tanah Papua
7. Segera menutup semua usaha penjualan Miras
8. KNPB mengajak semua rakyat Papua untuk melakukan mobilisasi menuju mogok sipil demi agenda hak penentuan nasib sendiri bagi Bangsa Papua

Pasca perayaan Hari HAM Internasional, generasi terus mendesak Negara dan Dunia Internasional terkait pelurusan sejarah dan Pemberian Hak Penentuan Nasib Sendiri. Moment yang digunakan adalah peringatan Hari Trikora, 19 Desember. Masa aksi menolak operasi Trikora yang dikumandangkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1961. Operasi ini merupakan salah satu operasi militer Indonesia yang menggagalkan

---

<sup>47</sup>Laporan yang disampaikan oleh Jubir KNPB Pusat

<sup>48</sup>*Ibid.*, video masa aksi Hari HAM 10 Desember 2018 yang dihadang oleh pihak TNI dan Polri, <https://www.facebook.com/westpapuaupdates/videos/372441966894544/>

kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Hindia Belanda bagi Bangsa Papua Barat. Aksi turun jalan ini tetap mendapat perlawanan dari aparat gabungan TNI Polri. Operasi Trikora juga merupakan salah satu operasi pendudukan Negara Indonesia di Tanah Papua. Selain itu operasi Trikora dinilai juga sebagai malapetaka dan pemusnahan manusia Papua. Di Tanah Papua, masa aksi dikoordinir oleh KNPB, sedangkan di luar Tanah Papua, masa dikoordinir oleh AMP dan FRI West Papua.

Aksi ini dilakukan di beberapa daerah di Tanah Papua dan Luar Tanah Papua. Di Tanah Papua aksi dilakukan di Merauke, Timika dan Jayapura. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh KNPB Pusat masa aksi di Kota Jayapura sebanyak 29 orang ditangkap oleh kepolisian, 15 orang di Sentani, 9 orang di Expo Kota Jayapura, Kampus Uncen 2 orang, Rusunawa Perumnas III Waena 3 orang. Di Kota Merauke ada 4 orang ditangkap, di Timika ada 130 orang ditangkap<sup>49</sup>. Di Luar Tanah Papua, masa aksi di Kota Malang sebanyak 64 orang ditangkap (16 orang dipukul oleh aparat kepolisian dan Ormas), di Bali sebanyak 66 orang masa aksi dibubarkan oleh aparat kepolisian (4 orang dipukuli), di Kota Ternate sebanyak 7 orang ditangkap (mereka dipukuli oleh aparat gabungan)<sup>50</sup>. Selain menolak bahwa adanya Operasi Trikora, masa aksi juga menuntut agar Indonesia membuka akses bagi jurnalis asing melakukan investigasi di Tanah Papua, seperti pada Kasus Nduga Desember 2018.

Perlawanan dari Negara melalui alat negaranya (TNI dan Polri) bukan saja melakukan pembubaran, pemukulan dan penangkapan masa aksi tetapi juga melakukan pengrusakan asrama mahasiswa Tolikara dan Lani Jaya, di Waena, Kota Jayapura dan menyita Hand Phone milik mahasiswa di asrama tersebut<sup>51</sup>.

Sebulan sebelumnya ruang gerak organisasi KNPB semakin ditekan. Kesempatan untuk merayakan hari berdirinya organisasi seperti organisasi lainnya terpaksa berurusan dengan aparat keamanan. Perayaan Dies ke-10 KNPB tidak diperkenan oleh Negara

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, bdk. [https://kbr.id/nasional/12-2018/knpb\\_aparat\\_bubarkan\\_aksi\\_tolak\\_trikora\\_19\\_desember\\_ratusan\\_orang\\_ditahan/98489.html](https://kbr.id/nasional/12-2018/knpb_aparat_bubarkan_aksi_tolak_trikora_19_desember_ratusan_orang_ditahan/98489.html), diakses pada Kamis, 20 Desember 2018

<sup>50</sup> *Ibid.*, bdk. <https://tirto.id/demo-menolak-trikora-kembali-berujung-penangkapan-aktivis-papua-dcia>, diakses pada Sabtu, 22 Desember 2018

<sup>51</sup> Video penjelasan dan pernyataan terkait pengrusakan asrama yang dilakukan oleh TNI Polri pada 19 Desember 2018, <https://www.facebook.com/westpapuaupdates/videos/597243524037687/> atau <https://youtu.be/rOQsxBFd1zE>, <https://www.facebook.com/westpapuaupdates/videos/329528970968420/> atau <https://youtu.be/144865MH7wU>



Indonesia melalui alat negaranya (TNI Polri). Padahal perayaan ini diisi dengan kegiatan diskusi tentang persoalan di Tanah Papua. Sebanyak 126 orang yang terlibat dalam diskusi tersebut diangkut ke Mapolresta Jayapura<sup>52</sup>.

Pasca beberapa aksi tersebut, KNPB menjadi sasaran 'amukan' dari aparat keamanan Indonesia. Anggota dan Sekretariat KNPB di Kota Jayapura dan beberapa wilayah lainnya, terus diteror, digeladahi dan dirusak oleh aparat gabungan. Di Timika, ketika merayakan hari lahirnya, aparat gabungan terpaksa membubarkan perayaan ibadah yang dilaksanakan oleh KNPB wilayah Mimika. Sekretariat KNPB Mimika juga dirusakan oleh kepolisian<sup>53</sup>. Di dalam siaran persnya, KNPB menilai bahwa tindakan dari pihak kepolisian di Mimika merupakan tindakan 'premanisme' yang mengambil ahli bangunan KNPB tanpa ada surat perintah. Selain itu pihak kepolisian menangkap 3 anggota KNPB Mimika yang dijadikan tersangka<sup>54</sup>. Di Kota Agats, sekretariat KNPB di wilayah Fait juga dibakar oleh pihak kepolisian setempat.

Hal menarik lainnya adalah salah satu mantan Tahan Politik Papua Fillep Karma menginisiasi pelaksanaan aksi kamisan. Seperti halnya dengan aksi kamisan yang dilakukan di Depan Istana Jakarta, aksi kamisan di Papua juga dilakukan untuk mendesak Negara Indonesia menyelesaikan segala kasus pelanggaran HAM, bukan saja di Tanah Papua tetapi di seluruh tanah Indonesia. Aksi kamisan pertama di Papua



Dok. KNPB  
Pengrusakan Sekretariat KNPB Mimika oleh  
Kepolisian



Dok. SKPKC FP  
Aksi Kamisan di Kota Jayapura

<sup>52</sup>Bdk. <http://fransiskanpapua.org/2018/11/19/perayaan-dies-ke-10-knpb-dibubarkan/>, diakses pada Senin, 19 November 2018

<sup>53</sup>Bisa nonton video pengrusakan Sekretariat KNPB Mimika di <https://www.facebook.com/westpapuaupdates/videos/1976231089348121/>

<sup>54</sup>Bdk. Siaran Pers KNPB pada 3 Januari 2019

dilakukan di Kota Jayapura pada Kamis, 20 Desember 2018 di Depan Kantor DPR Papua dan Gedung Sarinah Jayapura. Aksi Kamisan kedua yang dilaksanakan pada Kamis, 27 Desember 2018<sup>55</sup>. Namun aksi yang kedua ini dibubarkan oleh pihak kepolisian Kota Jayapura. Menurut pengakuan Fillep Karma bahwa pihak kepolisian tidak mengizinkan untuk melaksanakan aksi tersebut.

Cerita selanjutnya, segala peristiwa pelanggaran HAM di Tanah Papua semakin memanas ketika pada akhir Januari 2019 (25 Januari 2019), Tokoh Politik atau Ketua ULMWP Beni Wenda menyerahkan petisi referendum Papua kepada Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet. Petisi ini diklaim ditandatangani oleh 1,8 juta orang Papua<sup>56</sup>. Peristiwa ini membuat Negara Indonesia menjadi sibuk. Melalui Kementrian Luar Negeri RI, Negara Indonesia menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Wenda merupakan tindakan manipulatif dan *fake news*.<sup>57</sup> Selain penyerahan petisi, adalah suatu kemajuan di Negara Indonesia yakni akan memberikan kesempatan kepada Komisi Tinggi HAM PBB berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Tanah Papua. Wakil juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, dalam keterangan tertulis kepada BBC News Indonesia mengatakan "pada prinsipnya Indonesia telah setuju untuk memberikan akses ke Papua"<sup>58</sup>. Kita menunggu segala proses yang akan terjadi pada tahun 2019 terkait rencana tersebut.

---

<sup>55</sup>Bdk. <http://fransiskanpapua.org/2018/12/21/aksi-kamisan-di-tanah-papua/>, diakses pada Jumat, 21 Desember 2018

<sup>56</sup>Bdk. Koran Jubi Terbitan 4-5 Februari 2019

<sup>57</sup>Bdk. <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/31/21391781/petisi-referendum-kemerdekaan-papua-barat-diserahkan-ke-pbb-ini-respons>, diakses pada Jumat, 1 Februari 2019

<sup>58</sup>Bdk. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47052997>, diakses pada Jumat, 1 Februari 2019

## **Penutup: Refleksi dan Resolusi**

Duka di Tanah Ndugama (Alguru dan Yigi) yang merenggut nyawa para pekerja jalan Trans Papua, Militer dan warga sipil Nduga memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya. Duka di Tanah Papua hingga saat ini dan mungkin yang akan datang tidak akan pernah selesai. Konflik karena 'dendam' yang terus tersimpan dan berakar terus meledak kapan dan dimana saja di Tanah Papua. Perbedaan ideologi "Penentuan Nasib Sendiri" dan Negara Kesatuan Republik Indonesia" terus berperang dan mengorbankan nyawa manusia yang lainnya. Selain itu, penguasaan akan sumber daya atau kekayaan alam di Tanah Papua menjadikan Tanah dan Manusia Papua setiap tahun hilang lenyap. Penguasaan yang menolak independensi dari media/jurnalis, tim solidaritas lokal dan dunia internasional untuk mengungkapkan persoalan Papua menjadi salah satu kekaburan tentang apa yang sedang terjadi.

Ruang untuk menyampaikan pendapat dan suara di tempat umum seperti yang dijanjikan oleh Peraturan Negara Indonesia yakni UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No.9 tahun 1998 tidak dilaksanakan oleh alat negaranya (TNI Polri). Alat Negara (TNI Polri) selalu menghubungkan suara menuntut keadilan itu adalah tindakan makar. Di Tanah Papua, dua peraturan atau undang-undang ini tidak berlaku. Negara melalui alatnya (TNI Polri) menggunakan peraturannya sendiri untuk membungkam ruang demokrasi. Sebenarnya, apa yang dikehendaki oleh Negara Indonesia melalui alatnya? Karon Mambrasar, salah satu pengacara HAM Papua yang bergabung di PAHAM Papua menilai bahwa suara kebebasan untuk segala isu apapun termasuk isu politik itu dijamin oleh undang-undang di Negara Indonesia. Tetapi untuk itu di Papua tidak berlaku

*"Kebebasan berekspresi untuk menyampaikan pendapat dalam bentuk tulisan, diskusi dalam konteks isu apapun termasuk isu politik itu dijamin oleh undang-undang. Itu adalah perintah Negara. Artinya hak yang sama itu diperbolehkan dan bisa dilakukan oleh orang-orang Papua tanpa terkecuali"*<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Bisa lihat video siaran persnya di [https://www.youtube.com/watch?v=rpLySNZ\\_x1s](https://www.youtube.com/watch?v=rpLySNZ_x1s)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Thedi Wakum, Pengacara dari LBH Papua.

*“Pendekatan untuk HTI dan FPI dalam aksi aman-aman saja dilakukan oleh pihak kepolisian dan TNI. Tetapi semakin ke sini (Papua), proses hukumnya berjalan di tempat. Tidak ada langkah yang lebih maju atau perubahan. Ada diskriminatif hukum terhadap orang Papua”<sup>60</sup>*

Papua, karena perbedaan ideologi terus melahirkan **kekerasan dan pembunuhan**. Papua, karena permintaan dan suara untuk pelurusan sejarah melahirkan kekerasan dan pembunuhan. Papua, karena perjuangan untuk keadilan, kebenaran dan penolakan segala perampasan lahan tetap melahirkan kekerasan dan pembunuhan. Korban ada pada pihak yang memperjuangkan kemerdekaan, pada pihak alat negara, pada masyarakat sipil dan alam Papua. Siapa yang perlu disalahkan? Mungkinkah dialog atau perundingan segitiga yang sungguh bermartabat dan yang melibatkan pihak netral dapat dilaksanakan untuk mencari solusi mengakhiri segala kekerasan dan pembunuhan yang terjadi? Mungkinkah jalan referendum dapat mengakhiri segala kekerasan dan pembunuhan di Tanah Papua? Baik itu jalan referendum ataupun dialog atau perundingan segitiga, suasana damai dan adil tetaplah menjadi tujuan dan hasil yang diperoleh.

Walaupun demikian ada beberapa hal yang dapat kami bagikan dalam tulisan ini terkait beberapa peristiwa yang sudah kami sebutkan di atas. Dari cerita tiga peristiwa di atas dapat kami simpulkan bahwa semakin jelas dan tak mungkin berakhir di Tanah Papua, satu penentu kebijakan dan penguasa tunggal yakni aparat keamanan. Segala otoritas sipil (masyarakat adat dan pemerintah daerah) sengaja dimarginalkan demi kepentingan Negara Indonesia. Dalam refleksi, kami melihat bahwa di Tanah Papua semakin kuat dengan tindakan militerisme. Hal ini bisa terlihat dengan rencana mengembangkan markas Angkatan Laut di Sorong, angkatan Udara di Biak, membangun markas Brimob di Jayawijaya dan rencana pembangunan markas Brigade di Kimbim, Jayawijaya.

Kedudukan yang superior dari militerisme juga terungkap dalam sejumlah tindakan yang sewenang-wenang serta arogansi tanpa mau pusing dengan peraturan hukum. Sebut saja, penghancuran dan pengambilan alih kantor KNPB di Timika, pembakaran kantor

---

<sup>60</sup>*Ibid.*,

KNPB di Fait, Agats, pengrusakan Kantor KNPB di Jayapura dan lebih-lebih lagi adalah penangkapan sejumlah aktivis KNPB (Timika, Jayapura), mahasiswa (Jayapura dan Malang) di Timika<sup>61</sup>.

Dalam segala tindakan ini aparat menunjukkan bahwa mereka “tidak perlu dengar siapapun” dan “mereka selalu benar termasuk informasinya”. Hal demikian juga terungkap melalui ‘seruan frustrasi’ Pemda/Gub serta DPRD yang menuntut TNI ditarik keluar dari Nduga/Papua.

*"Ini adalah momen Natal, tidak boleh lagi ada TNI dan Polri di sana. Kami juga sepakat membentuk tim independen sehingga tidak banyak pelanggaran terjadi terhadap masyarakat sipil. Pasukan harus ditarik. Kita berbelasungkawa apa yang terjadi pertama dan saat ini. Sudah cukup, jangan lagi ada korban jiwa di sana. Masyarakat belum diungsikan, mereka sudah masuk (kejar pelaku). Makanya kami minta tarik semua dulu"<sup>62</sup>*

Ketika otoritas sipil dalam hal ini Gubernur Papua Lukas Enembe angkat suara agar militer ditarik dari Tanah Ndugama, pihak militer dan pemerintah pusat sepertinya tidak menerima.

*"Jadi menurut saya, gubernur dan ketua DPR serta pihak manapun tidak sepatutnya meminta aparat keamanan TNI-Polri ditarik dari Nduga di mana di daerah tersebut telah terjadi pelanggaran hukum berat yang harus mendapatkan penindakan hukum"<sup>63</sup>*

Selain dari pihak militer, Negara dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri juga menilai bahwa pernyataan Gubernur Lukas Enembe untuk menarik militer dari Nduga merupakan sebuah ungkapan yang mengada-ada dan tidak pantas disampaikan oleh seorang gubernur.

*"Tidak seharusnya seorang pimpinan daerah dan ketua DPRD memberikan pernyataan seperti itu. Kehadiran TNI/Polri di Papua murni untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan negara dan menjaga stabilitas serta ketentraman ketertiban masyarakat di Nduga, Papua. Alasan*

---

<sup>61</sup>Untuk aktivis KNPB Wilayah Timika ada 3 orang yang ditangkap dan dituduh melakukan makar oleh pihak kepolisian. Ketiga aktivis tersebut adalah Yanto Awerkion, Sem Asso dan Eman Dogopia. Ketiga aktivis ini sampai menjalani pemeriksaan di Polda Papua pada Januari 2019. Ketiganya didampingi oleh pengacara PAHAM Papua dan LBH Papua

<sup>62</sup>Ungkapan yang disampaikan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, bdk. <https://tabloidjubi.com/artikel-22111-gubernur-dan-dpr-papua-sepakat-tarik-aparat-keamanan-dari-nduga.html>, diakses pada Sabtu, 23 Desember 2018

<sup>63</sup>Ungkapan yang disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf. Muhamad Aidi, bdk. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181221150202-20-355527/tni-gubernur-papua-tak-pantas-minta-tarik-pasukan-dari-nduga>, diakses pada Sabtu, 22 Desember 2018

*karena membuat penduduk desa trauma dan memberikan kesempatan para penduduk merayakan Natal dengan damai adalah alasan yang mengada-ada*<sup>64</sup>

Berhubung dengan segala trend dan derasnya militarisasi di Tanah Papua maka kami menawarkan beberapa resolusi atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat menindaklanjuti dengan serius permintaan Gubernur dan DPRD Papua untuk menarik seluruh pasukan militer (organik dan non-organik) dari Kabupten Nduga.
2. Pemerintah Pusat menghentikan segala upaya militarisasi di Tanah Papua dengan mengurangi signifikan kehadiran pasukan militer, menghentikan segala program pembangunan markas yang baru seperti yang direncanakan di beberapa wilayah di Tanah Papua : Kabupaten Jayawijaya (Brimob, Brigade), Biak Supiori dan Sorong
3. Pemerintah Pusat mendukung dan membantu aktif Pemerintah Daerah di Papua untuk memulihkan kembali otoritasnya sejalan dengan status 'otonomi khusus' atas segala gerak-gerik militer dan kepolisian di Tanah Papua.
4. Pemerintah Daerah (Papua dan Papua Barat) yang didukung oleh DPRD harus menolak segala bentuk militarisasi di Tanah Papua, dan menunjukkan otoritasnya atas pola kehadiran militer serta pasukan gabungan militer/polisi di Tanah Papua.
5. DPRD (Papua dan Papua Barat) supaya membentuk suatu PanSus guna memonitor serta mengendalikan segala upaya pihak militer dan kepolisian yang memperluas kehadirannya serta gaya beroperasinya di lapangan.
6. Pemerintah Daerah (Papua dan Papua Barat) membentuk suatu tim khusus ahli hukum yang kompeten untuk membantu langsung semua warga dan organisasi kemasyarakatan yang diperlakukan sewenang-wenangnya (yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum) oleh pihak militer dan kepolisian
7. Pemerintah Daerah (Papua dan Papua Barat) menjamin hak bebas berkumpul serta hak bebas mengungkapkan pendapatnya secara damai bagi setiap warga di Tanah Papua tanpa pengecualian
8. Pemerintah Daerah (Papua dan Papua Barat) menjamin dan memerintahkan pihak keamanan untuk memberikan hak akses pada para Lembaga Mediasi

---

<sup>64</sup>Ungkapan yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Indonesia Bahtiar, bdk. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181222222932-20-355765/kemdagri-kecam-gubernur-papua-soal-tarik-tni-polri-dari-nduga>, diakses pada Kamis, 27 Desember 2018

(Gereja, Agama, Adat, LSM, MRP/MRPB, Cendikiawan) serta wartawan; hak akses ini termasuk bebas bergerak, mencari informasi dan memberikan pendampingan pada warga di wilayah berkonflik, dan supaya informasi yang benar dapat diperoleh masyarakat luas.

9. Para Pemimpin Lembaga Mediasi (Gereja, Agama, Adat, LSM, MRP/MRPB, Cendikiawan) turut memperjuangkan supaya Papua dibebaskan militarisasi.
10. Para Pemimpin Lembaga Mediasi (Gereja, Agama, Adat, LSM, MRP/MRPB, Cendikiawan) turut membantu Pemerintah Daerah menegaskan dan menjamin supaya semua warga diberlakukan sama di depan hukum.
11. Para Pemimpin Lembaga Mediasi (Gereja, Agama, Adat, LSM, MRP/MRPB, Cendikiawan) turut membantu Pemerintah Daerah menegaskan dan menjamin hak bicara dan mengungkapkan pendapatnya secara bebas dan damai.
12. Pemerintah Daerah (Papua dan Papua Barat) menolak dengan tegas segala proyek investor yang menghancurkan tanah, hutan dan tatanan masyarakat Adat di Tanah Papua
13. Pemerintah Daerah (Papua dan Papua Barat) menolak dengan tegas proyek-proyek pembangunan yang tidak dilengkapi dengan suatu persetujuan masyarakat adat di Tanah Papua dan yang tidak dapat dilaksanakan masyarakat Papua sendiri.